

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2023/Khusus - Awal Menjabat)**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**UNIT KERJA** : RSUD KOTA YOGYAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **TRİYANTA**
2. Jabatan : **BENDAHARA**
3. NHK : **888943**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 405.148.000**

1. Tanah Seluas 319 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI  
Rp. 80.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 872114 m2/114 m2 di KAB / KOTA  
BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 70.548.000
3. Tanah Seluas 1375 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp.  
75.000.000
4. Tanah Seluas 505 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp.  
30.000.000
5. Tanah Seluas 345 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI  
Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 216 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI  
Rp. 21.000.000
7. Tanah Seluas 286 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI  
Rp. 28.600.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 15.500.000**

1. MOTOR, HONDA ASTREA 100 Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp.  
2.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 125 D (KARISMA) Tahun 2004, HASIL  
SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA NF 125 ( SUPRA X 125 ) Tahun 2012, HASIL  
SENDIRI Rp. 7.000.000



4. LAINNYA, GAZELLE SEPEDA ONTEL Tahun 1974, HASIL  
SENDIRI Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	37.300.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.703.846
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	459.651.846
III. HUTANG	Rp.	249.629.050
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	210.022.796

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.